

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Kencana Prenada Media Group. 2009.
- AP Parlindungan. *Landreform Di Indonesia Strategi dan Sasarannya*. Alumni. Bandung. 1990.
- _____. *Aneka Hukum Agraria*. Alumni. Bandung. 1997.
- Aslan Noor. *Konsepsi Hak Milik atas Tanah bagi Bangsa Indonesia*. CV. Mandar Maju. Bandung. 2006.
- Ateng Syafrudin. *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Orasi Disertasi Unpar. Bandung. 1983.
- Bachsan Mustafa. *Hukum Agraria Dalam Perspektif*. Remaja Karya CV. Bandung. 1984.
- Bachtiar Effendie. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*. Alumni. Bandung. 1984.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju. Bandung. 2008.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Penerbit Djambatan. Edisi Revisi. Jakarta. 2004.
- _____. *Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Djambatan. Jakarta. 2006.
- _____. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*. Universitas Trisakti. Jakarta. 2007.
- _____. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. jilid I Djambatan. Jakarta. 1994.
- Budi Agus Riswandi. *Aspek Hukum Internet Banking*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005.

- Eddy Ruchiyat. *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*. Alumni. Bandung. 1999.
- Effendi Perangin. *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. CV. Rajawali. Jakarta. 2003.
- Elita Rahmi. *Hukum Pertanahan dalam Sistem Hukum Indonesia*. Unpad Press. Bandung. 2011.
- Fence M. Wantu. *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2011.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang Undang Tentang Tata Usaha Negara*. Sinar Harapan. Jakarta. 1989.
- John Salindeho. *Masalah Tanah dalam Pembangunan*. Sinar Grafika. Jakarta. 1993.
- K. Wantjik Saleh. *Hak Anda Atas Tanah*. Ghalia Indonesia. Bandung. 2004.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosada Karta. Bandung. 1989.
- Maria Farida Indrati Suprato. *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi dan Muatan)*. Konisius. Yogyakarta. 2007.
- Maria S.W. Sumardjono. *Kebijakan Pertanahan. Antara Regulasi dan Implementasi*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta. 2005.
- Moh Mahfud MD. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)*. Renaka Cipta. Jakarta. 2010.
- Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis. *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*. Pustaka Bangsa Pers. Medan. 2004.
- Notohamidjojo. *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*. BPK Gunung Mulia. Salatiga. 1975.
- Notonegoro. *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta. 2001.
- R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. Cet VIII. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1989.
- S.F. Marbun. *Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. 1997.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013.

Siswo Yudo Husodo. *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Cet. I. 2006.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty. Yogyakarta. 1999.

Sunaryati Hartono. *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*. Alumni. Bandung. 1991.

Supriadi. *Hukum Agraria*. Edisi 1. Cetakan ke-7. Sinar Grafika. Jakarta. 2016.

B. Jurnal/Karya Ilmiah

Fernandes Sinaga dan Supsilani. "Fungsi Tanah dan Kaitannya dengan Konflik Tanah pada Masyarakat Batak Toba". *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*. 2. (1). (2016): 14-30. Program Studi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Medan. Indonesia.

Fifik Wiryani & Mokh. Najih. *The Yuridic Problems of Regulate People's Land Taking For The Construction On The Public Utility*. Law Faculty of Muhammadiyah University of Malang. 2005.

Ilyas, Abdurrahman, dan Sufyan. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah". *Kanun Jurnal Hukum*. No. 65. Th. XVII (April, 2015). Pp. 1-18.

Laksita. *Legalitas Kuasa Dalam Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli (Studi di Kota Semarang)*. Diponegoro Law Journal. vol. 6. no. 1. pp. 1-11. Feb. 2017.

Ni Nyoman Mariadi. *Kewenangan Pemerintah Dalam Menetapkan Penguasaan Dan Pemilikan Luas Tanah Pertanian*. Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar. 2001.

Philippus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu. Surabaya. 1987.

Rifky Anggatiastara Cipta, dkk. *Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Sebelum Dibuatnya Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Edisi 08 Nomor 2

September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702 *NOTARIUS*. Volume 13. Nomor 2. (2020) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702.

Satjipto Rahardjo. *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum. 1993.

Setiono. *Rule Of Law (supremasi hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2004.

Supriyadi. *Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Pertanahan*. Jurnal Arena Hukum. Volume 9. Nomor 2. Agustus 2016.

Susanti. *Praktek Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Notaris di Jakarta Timur*. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. 2008.

Untung Subagio. *Kepemilikan Tanah Absentee Dalam Program Landreform Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961*. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi. Jambi. 2014.

C. Kamus

John M. Echols dan Hasan Sadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Gramedia. Jakarta. 1996.

Sudarsono. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Tim Penyusun Kamus. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Undang-undang Pokok Agraria*. UU Nomor 5 Tahun 1960. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

——— *Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. UU Nomor 30 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

——— Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran

Tanah. PP Nomor 18 Tahun 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630.

E. Artikel Internet

Adityo Ariwibowo. *Pengecualian Pemilikan Tanah Secara Guntai (Absentee)*. <http://adityoariwibowo.wordpress.com>, diakses tanggal 28 Agustus 2021.

Ariska Dewi. *Peran Kantor Pertanahan Dalam Mengatasi Kepemilikan Tanah "Absentee/Guntai" di Kabupaten Banyumas*. Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. 2008. <http://eprints.undip.ac.id>. diakses tanggal 28 Februari 2021.

Aslan Noor. *Konsepsi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia*. Universitas Padjadjaran Repository. <http://repository.unpad.ac.id>. diakses tanggal 28 Agustus 2021.

Den Bagus Rasjid. *Kepemilikan Tanah Absentee Dan Landreform Di Indonesia*. <http://denbagusrasjid.wordpress.com>, Diakses tanggal 28 Agustus 2021.

Gunawan Wiradi. *Dampak Land Reform terhadap Perekonomian Negara*. <http://rumahkiri.net>, Diakses tanggal 28 Agustus 2021.

<http://tesishukum.com>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2021 pukul 12.59 WIB.

Myrizal. *Peran PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah, Dunia Hukum*. <http://fh.unpad.ac.id>. diakses tanggal 10 September 2021.

Sarman Sagala. *Relevansi Pembatasan Tanah Pertanian Secara Absentee Menggunakan Analisa SWOT*. <http://sarmanpsagala.files.wordpress.com>. diakses tanggal 28 Agustus 2021.